

PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA MANADO

Oleh:
Nadya Pretti Kalalo¹
Jantje J. Tinangon²
Inggriani Elim³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: ¹nadya_pretti@yahoo.com
²tjantjeanny@yahoo.com
³e_inggriani@yahoo.com

ABSTRAK

Kinerja keuangan menunjukkan kondisi keuangan serta kemampuan pemerintah dalam memperoleh dan menggunakan dana untuk pembangunan negara dan menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Untuk itu perlu diukur kinerja pemerintah, sejauh mana kemajuan yang dicapai oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pada Pemerintah Kota Manado. Penelitian ini dilakukan di kantor Walikota Manado dan data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif untuk mengukur kinerja keuangan dengan rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukkan, rasio derajat desentralisasi kinerja keuangannya dinilai baik karena setiap tahunnya PAD meningkat, rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan ketergantungan Pemerintah Kota Manado terhadap Pendapatan dari Pusat dan Provinsi masih tinggi, begitu juga dengan kemandirian keuangannya masih rendah meskipun setiap tahunnya PAD Pemerintah Kota Manado mengalami peningkatan. Rasio efektivitas PAD menunjukkan kinerja keuangannya mengalami peningkatan, begitu juga dengan efektivitas pajak daerah yang nampak efektif, sedangkan PAD yang diterima melalui Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang dihitung melalui rasio derajat kontribusi BUMD dapat dikatakan baik karena setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Kata kunci: kinerja sektor publik, kinerja keuangan, rasio keuangan.

ABSTRACT

Financial performance shows the financial condition and government ability to obtain and use funds for development of the country and resulting better public service. Therefore it is necessary to measure performance of the government, how far the progress made by the government in carrying out its duties. The purpose of this study is to know the financial performance of Manado City Government. This Research was conducted at the office of the mayor of Manado and the data that used in this study is a quantitative data in the form of Budget Realization Report (LRA). The method used is descriptive quantitative method measures financial performance with financial ratios. The results show that the ratio of the degree of decentralization is rated good because PAD increases annually, the dependency ratio is obtained that the government's reliance on revenue from central and the province is still high and its financial independence, is still low although PAD increase each year. The PAD effectiveness ratio show the financial performance has increased. It's with local tax effectiveness which looked effective, while the PAD receive from the result of regional wealth management are separated can say good because each year has increased.

Keywords: public sector performance, financial performance, financial ratio

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kinerja pemerintah merupakan suatu hal yang menjadi fokus perhatian dalam pengelolaan keuangan negara. Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika mampu melaksanakan tujuan yang telah disepakati bersama. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, dapat digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban kepada publik.

Pengukuran kinerja dapat digunakan untuk menilai keberhasilan organisasi dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan sistem imbalan atau sebagai dasar penyusunan strategi perusahaan atau organisasi dalam rangka menciptakan *good governance*. Hal ini menekankan pada peranan manager publik agar memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mendorong meningkatkan pengelolaan manajerial yang bersih dari korupsi. Sistem pengukuran kinerja sektor publik merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manager publik menilai pencapaian suatu strategi. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*.

Kinerja keuangan dapat menunjukkan bagaimana kondisi keuangan pemerintah serta kemampuan pemerintah dalam memperoleh dan menggunakan dana untuk pembangunan negara. Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Kinerja keuangan dapat menunjukkan bagaimana kondisi keuangan pemerintah serta kemampuan pemerintah dalam memperoleh dan menggunakan dana untuk pembangunan negara. Untuk mengetahui kinerja keuangan, maka diperlukan suatu analisis terhadap kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan. Menurut Mahmudi (2010:142), analisis rasio keuangan terdiri dari rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, rasio efektivitas pajak daerah dan rasio derajat kontribusi BUMD.

Pemerintah Kota Manado yang juga adalah ibukota Provinsi Sulawesi Utara merupakan organisasi pemerintah yang menggunakan dana baik dari pemerintah pusat dan provinsi maupun dana dari masyarakat harus mampu mengelola keuangannya secara bertanggungjawab. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengukur kinerja keuangan pada Pemerintah Kota Manado dengan menggunakan analisis rasio keuangan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan pada Pemerintah Kota Manado, khususnya tahun anggaran 2010-2012.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 menyatakan akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Kieso, dkk (2007:2) menyatakan Akuntansi adalah pengidentifikasian, pengukuran dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada pihak yang berkepentingan. Suhayati dan Anggadini (2009:2) menyatakan akuntansi adalah semua proses yang meliputi identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi.

Akuntansi Pemerintahan

Mursyidi (2009:1) menyatakan akuntansi pemerintahan adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya. Nordiawan dan Hertianti (2010:4) menyatakan akuntansi sektor publik adalah sebuah entitas ekonomi yang menyediakan barang dan/atau jasa publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan finansial.

Standar Akuntansi Pemerintahan

Hariadi, dkk (2010:112) menyatakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP dinyatakan dalam bentuk Persyaratan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu uraian yang memuat latar belakang penyusunan SAP.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Mahmudi (2010:19) menyatakan sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan kumpulan dari subsistem-subsistem yang di dalam setiap subsistem tersebut terdapat tahap-tahap, prosedur, perangkat, dan peraturan yang harus diikuti dalam rangka mengumpulkan dan mencatat data keuangan, kemudian mengolah data tersebut menjadi berbagai laporan keuangan untuk pihak luar maupun internal pemerintah daerah. Pengimplementasian sistem akuntansi pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mendukung operasi rutin harian, meningkatkan kualitas laporan keuangan, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas finansial, dan melindungi aset pemerintah daerah.

Aspek-Aspek Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Mahsun (2009:31) menyatakan aspek-aspek pengukuran kinerja sektor publik meliputi:

1. Kelompok masukan (*input*)
2. Kelompok proses (*process*)
3. Kelompok keluaran (*output*)
4. Kelompok hasil (*outcome*)
5. Kelompok manfaat (*benefit*)
6. Kelompok dampak (*impact*)

Rasio Keuangan sebagai Pengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Mahmudi (2010:142), analisis rasio keuangan terdiri dari:

1. Rasio Derajat Desentralisasi

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

$$\text{Rasio ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio Kemandirian Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Propinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

4. Rasio Efektivitas PAD

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

5. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

6. Derajat Kontribusi BUMD

$$\text{Derajat Kontribusi BUMD} = \frac{\text{Penerimaan Bagian Laba BUMD}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, menyatakan laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. Untuk mengetahui kondisi keuangan suatu organisasi apakah tergolong sehat atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangannya. Mahmudi (2010:9) menyatakan meskipun laporan keuangan sudah bersifat *general purposive*, artinya dibuat lebih umum dan sederhana mungkin untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, tetapi tidak semua pembaca laporan dapat memahami laporan tersebut dengan baik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

a. Pendapatan daerah

Pendapatan daerah dikelompokkan atas:

1. Pendapatan Asli daerah (Pajak daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah).
2. Dana Perimbangan (Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus).
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Hibah).

b. Belanja daerah

Belanja dikelompokkan menjadi:

1. Belanja Tidak Langsung, yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga)
2. Belanja Langsung, yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal).

- c. Pembiayaan daerah
Pembiayaan daerah terdiri dari:
1. Penerimaan pembiayaan
 2. Pengeluaran pembiayaan.

Penelitian Terdahulu

1. Sagay (2013) dengan judul Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Minahasa Selatan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam mengolah anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2009-2011. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kinerja pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam mengolah pendapatannya belum baik. Ini dilihat dari varians pendapatan yang menunjukkan belum adanya realisasi pendapatan yang mencapai target. Kinerja pemerintah dalam mengolah anggaran belanja sudah cukup baik, ini dilihat dari tidak adanya realisasi belanja yang melebihi dari yang dianggarkan.
2. Anastasia (2012) dengan judul Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis laporan keuangan Kabupaten Bulukumba dan mengetahui kinerja dalam mengelola keuangan daerah yang dinilai dengan menggunakan rasio keuangan terhadap APBD. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian yang didapat adalah kinerja keuangan Kabupaten Bulukumba selama periode penelitian (2008-2010) kurang baik karena hampir semua perhitungan rasio mengalami penurunan kinerja.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan berupa penelitian deskriptif di mana peneliti secara langsung mendatangi objek penelitian untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan, mengolah data dan informasi tersebut, menganalisis dan kemudian menarik kesimpulan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Manado di Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah yang beralamat di Jl. Balai Kota No.1 Tikala dan waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari 2014.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi latar belakang masalah dalam penelitian ini.
2. Merumuskan masalah dalam penelitian ini.
3. Mencari literatur –literatur yang terkait dalam penelitian ini.
4. Mengumpulkan data-data yang terkait dalam penelitian di Pemerintah Kota Manado.
5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Kuncoro (2009:145) menyatakan jenis data dapat dibedakan menjadi:

1. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka).
2. Data Kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran.

Sumber Data

Sangadji dan Sopiah (2010:190) menyatakan sumber penelitian dibagi menjadi dua yaitu:

1. Data Primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama.
2. Data Sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer berupa gambaran umum Pemerintah Kota Manado dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2010-2012.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teknik Wawancara
Teknik ini dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada staf dan pimpinan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.
2. Teknik Dokumentasi
Teknik ini dilakukan dengan cara mendapatkan informasi dari buku-buku, literature, majalah, jurnal, serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Metode analisis ini digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dengan rasio keuangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian**

Data yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kota Manado adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2010, 2011 dan 2012. Di dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, namun komponen dalam LRA yang digunakan hanyalah Pendapatan Daerah. Untuk mengukur kinerja keuangan tersebut digunakan perhitungan rasio keuangan.

Tabel 1. Total Pendapatan Daerah, Realisasi PAD, Target PAD, Pendapatan Transfer, Target Penerimaan Pajak Daerah, Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Laba BUMD

	2010	2011	2012
Total Pendapatan Daerah (Rp)	672.960.863.401	899.152.955.866	1.037.498.574.726
Realisasi PAD (Rp)	90.828.483.199	134.721.720.942	178.307.223.102
Target PAD (Rp)	121.312.677.538	163.614.427.858	171.028.198.384
Pendapatan Transfer (Rp)	581.799.045.202	764.431.234.924	859.191.351.624
Target Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	64.473.603.049	121.993.319.500	127.801.846.655
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	57.250.779.768	99.779.738.597	136.226.412.384
Laba BUMD (Rp)	925.847.046	1.870.534.580	2.017.393.696

Sumber: Pemkot Manado, 2014

Tabel 1 menunjukkan realisasi penerimaan pajak daerah dan laba BUMD tahun 2010-2012 terus meningkat. Pada tahun 2010 penerimaan pajak daerah Rp. 57.250.779.768 dan pada tahun 2011 mengalami kenaikan yang signifikan hingga mencapai Rp. 99.779.738.597 atau sekitar 74% dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2012 penerimaan pajak daerah sebesar Rp.136.226.412.384. Sedangkan penerimaan laba BUMD pada tahun 2010 sebesar Rp. 925.847.047, kemudian meningkat lebih dari 100% pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.870.534.580, tetapi pada tahun 2012 hanya meningkat 7,8% dari tahun sebelumnya yaitu Rp. 2.017.393.696.

1. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini dihitung dengan membandingkan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah.

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. Hasil Perhitungan menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio Keuangan	Tahun 2010 (%)	Tahun 2011 (%)	Tahun 2012 (%)
Rasio Derajat Desentralisasi	13,49	14,98	17,18

Sumber: Data Olahan, 2014

Perhitungan kinerja keuangan melalui rasio derajat desentralisasi, di dapat 13,49%, 14,98% dan 17,18% untuk tahun 2010, 2011 dan 2012. Secara presentase, PAD Pemerintah Kota Manado pada tahun 2010-2012 terhadap total pendapatan daerah meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2010, PAD ditargetkan akan mencapai Rp.126.312.677.538 tetapi hanya Rp.90.828.483.199 atau hanya 71,91% yang terealisasi. Hal ini dikarenakan pos-pos yang ada di PAD, semuanya tidak terealisasi sesuai dengan yang sudah ditargetkan. Pada tahun 2011, PAD ditargetkan akan mencapai Rp.163.614.427.858 tetapi hanya 82,34% yang terealisasi atau hanya sebesar Rp.134.721.720.942. Berbeda halnya dengan penerimaan PAD pada tahun 2012 yang mencapai Rp.178.307.223.102 dari yang sudah ditargetkan yaitu Rp.171.028.198.384, yang artinya realisasi penerimaan PAD lebih besar dari yang sudah ditargetkan atau mencapai 104,26%. Secara keseluruhan, kinerja keuangan dengan rasio derajat desentralisasi dapat dikatakan baik karena setiap tahunnya Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Manado meningkat.

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah.

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3. Hasil Perhitungan menggunakan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Keuangan	Tahun 2010 (%)	Tahun 2011 (%)	Tahun 2012 (%)
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	86,45	83,01	82,04

Sumber: Data Olahan, 2014

Rasio ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Kota Manado masih cukup tinggi terhadap pendapatan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Hal ini dapat dilihat dari besarnya pendapatan transfer yang diterima baik pendapatan transfer yang diterima dari pusat yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, DAK dan dana penyesuaian maupun dari pemerintah provinsi yaitu pendapatan bagi hasil pajak. Meskipun ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Kota Manado masih sangat tinggi terhadap Pemerintah Pusat dan Propinsi, dan secara nominal setiap tahunnya terjadi kenaikan pendapatan transfer, tetapi secara presentasi terjadi penurunan setiap tahunnya.

Rasio ketergantungan Pemerintah kota Manado pada tahun 2010, 2011 dan 2012 adalah 86,45%, 83,01% dan 82,01%. Pada tahun 2010, pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi adalah sebesar Rp.581.799.045.202. Pendapatan transfer yang diterima ini lebih besar dari yang sudah ditargetkan yaitu Rp.579.403.898.655. Pada tahun 2011, pendapatan transfer yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Provinsi adalah sebesar Rp.764.431.234.924. Sama halnya dengan tahun 2010, pada tahun 2011 pendapatan yang diterima dari pemerintah pusat dan provinsi lebih besar dari yang sudah ditargetkan, yaitu Rp.775.441.227.200. Dan pada tahun 2012, pendapatan transfer yang diterima oleh Pemerintah Kota Manado dari pemerintah pusat dan propinsi yaitu sebesar Rp.859.191.351.624 dari yang sudah ditargetkan yaitu sebesar Rp.845.104.616.478.

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 4. Hasil Perhitungan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Keuangan	Tahun 2010 (%)	Tahun 2011 (%)	Tahun 2012 (%)
Rasio Kemandirian	15,61	17,62	20,75

Sumber: Data Olahan, 2014

Kemandirian keuangan Pemerintah Kota Manado berkisar 15,61% sampai 20,75%. Hal ini dikarenakan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi jauh lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Manado. Pada tahun 2010, Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.90.828.483.199 sedangkan pendapatan transfer yang diterima mencapai Rp.581.799.045.202. Rasio kemandirian Pemerintah Kota Manado pada tahun 2010 yaitu 15,61%. Pada tahun 2011, PAD Pemerintah Kota Manado senilai Rp.134.721.720.942 sedangkan pendapatan transfer yang diterima adalah sebesar Rp.764.431.234.924. Rasio kemandirian Pemerintah Kota Manado yaitu 17,62%. Sedangkan pada tahun 2012, PAD Pemerintah Kota Manado adalah Rp.178.307.223.102 dan pendapatan transfer yang diterima adalah sebesar Rp.859.191.351.624.

4. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio ini dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan).

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 5. Hasil Perhitungan menggunakan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Keuangan	Tahun 2010 (%)	Tahun 2011 (%)	Tahun 2012 (%)
Rasio Efektivitas PAD	71,9	82,34	104,25

Sumber: Data Olahan, 2014

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Manado pada tahun 2010, 2011 dan 2012 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010 realisasi penerimaan PAD 71,91% atau Rp.90.828.483.199 dari PAD yang sudah di targetkan yaitu Rp.126.312.677.538. Pada tahun 2011, realisasi

penerimaan PAD meningkat menjadi Rp.134.721.720.942 82,34% dari PAD yang sudah ditargetkan yaitu sebesar Rp.163.614.427.858. Sedangkan pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang signifikan, mencapai 104,26% atau Rp.178.307.220.102, lebih besar dari yang sudah ditargetkan sebelumnya. Secara keseluruhan efektivitas penerimaan PAD tahun 2010-2012 dapat dikatakan efektif karena setiap tahunnya mengalami peningkatan.

5. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan.

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 6. Hasil Perhitungan menggunakan Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Rasio Keuangan	Tahun 2010 (%)	Tahun 2011 (%)	Tahun 2012 (%)
Rasio Efektivitas Pajak Daerah	88,79	81,79	106,58

Sumber: Data Olahan, 2014

Tahun 2010, target penerimaan pajak daerah yaitu Rp.64.473.603.049 dan yang terealisasi hanya 88,80% menurut rasio efektivitas pajak daerah atau hanya Rp.57.250.779.768. Pada tahun 2011, penerimaan pajak daerah secara presentase menurun menjadi 81,79% meskipun secara nominal penerimaan pajak daerah meningkat menjadi Rp.99.779.738.597 dari yang sudah ditargetkan yaitu sebesar Rp.121.993.315.500. Pada tahun 2012, penerimaan pajak daerah mencapai 106,59% atau sebesar Rp.136.226.412.384. Penerimaan pajak daerah tahun 2012 lebih besar dari yang sudah ditargetkan yaitu sebesar Rp.127.801.846.655.

6. Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini dihitung dengan membandingkan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total Pendapatan Asli Daerah.

$$\text{Derajat Kontribusi BUMD} = \frac{\text{Penerimaan Bagian Laba BUMD}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 7. Hasil Perhitungan menggunakan Derajat Kontribusi BUMD

Rasio Keuangan	Tahun 2010 (%)	Tahun 2011 (%)	Tahun 2012 (%)
Rasio Kontribusi BUMD	1,01	1,38	1,13

Sumber: Data Olahan, 2014

Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan juga memiliki kontribusi dalam mendukung pendapatan di Pemerintahan Kota Manado. Pada tahun 2010, PAD yang diterima melalui Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp.925.847.046 atau menurut rasio derajat kontribusi BUMD, yaitu 1,01% dari total penerimaan PAD. Pada tahun 2011 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu lebih dari 100% dari tahun sebelumnya sehingga menjadi Rp.1.870.543.580 dari total penerimaan PAD meski secara presentase bila dihitung dengan rasio derajat

kontribusi BUMD hanya 1,38%. Sedangkan pada tahun 2012 juga mengalami peningkatan yaitu Rp.2.017.393.696 atau 1.13% dari total Penerimaan PAD tahun 2012.

Pembahasan

1. Meningkatnya kontribusi PAD menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Pada tahun 2010-2012, melalui perhitungan menggunakan rasio derajat desentralisasi dapat dilihat bahwa kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah Pemerintah Kota Manado masih rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Sagay (2013) pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, kontribusi PAD dalam penyelenggaraan desentralisasi di Kabupaten Minahasa Selatan untuk tahun 2010 dan 2011 lebih rendah bila dibandingkan yang ada pada Pemerintah Kota Manado. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah Kota Manado dalam penyelenggaraan desentralisasi cukup baik dibandingkan dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Besarnya rasio ketergantungan keuangan daerah berarti besar pula tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Meskipun ketergantungan keuangan Pemerintah Kota Manado terhadap Pemerintah Pusat dan Provinsi masih cukup tinggi, tapi setiap tahunnya rasio ketergantungan keuangan daerahnya terus mengalami penurunan meski tidak begitu signifikan.
3. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerahnya. Meski kinerja keuangan Pemerintah Kota Manado belum mandiri tapi dapat dikatakan baik, karena setiap tahunnya angka rasio kemandiriannya terus meningkat. Bila dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anastasia (2012) pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba, untuk tahun 2010 rasio kemandiriannya jauh lebih kecil dari rasio kemandirian Pemerintah Kota Manado. Dengan demikian, pemerintah Kota Manado cukup baik dalam hal kemandirian keuangan daerah.
4. Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio efektivitas PAD Pemerintah Kota Manado mengalami peningkatan setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2012 penerimaan PAD lebih besar dari yang sudah ditargetkan. Penelitian oleh Muntu (2011) pada Pemerintah Kota Bitung, penerimaan PAD Kota Bitung pada tahun 2010 hampir terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan. Terlihat bahwa Pemerintah Kota Bitung juga sudah efektif dalam penerimaan PAD.
5. Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Meskipun penerimaan pajak daerah pada tahun 2011 menurun dari tahun sebelumnya, tetapi dapat dikatakan efektif karena bila dilihat dari penerimaan pajak daerah pada tahun 2012 yang lebih besar dari yang sudah ditargetkan.
6. Rasio derajat kontribusi BUMD dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Secara presentase penerimaan PAD Pemerintah Kota Manado yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terlihat kecil, tetapi bila dilihat secara nominal mengalami peningkatan penerimaan setiap tahunnya.

Kinerja Pemerintah Kota Manado dalam mengelola keuangannya sudah cukup baik. Meskipun begitu, pemerintah diharapkan dapat lebih mengembangkan kinerjanya dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kota Manado, sehingga pos-pos yang ada di PAD dapat terealisasi sebagaimana yang telah ditargetkan dan hal ini pun akan nampak bahwa kinerja pemerintah Kota Manado dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Rasio derajat desentralisasi menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Manado tahun 2010-2012 dinilai baik karena dilihat dari Pendapatan Asli Daerah yang meningkat setiap tahunnya.
2. Rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan ketergantungan Pemerintah Kota Manado terhadap Pendapatan dari Pusat dan Provinsi masih cukup tinggi.
3. Kemandirian keuangan Pemerintah Kota Manado masih cukup rendah tetapi setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

4. Efektivitas PAD Pemerintah Kota Manado tahun 2010-2012 secara presentase terus meningkat, begitu juga dengan pajak daerah.
5. PAD yang diterima melalui Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dapat dikatakan baik karena setiap tahunnya mengalami peningkatan meski tidak begitu signifikan.

Saran

Saran yang disampaikan penulis adalah:

1. Pemerintah Kota Manado diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat terpenuhi.
2. Penulis menyarankan untuk dapat melakukan penelitian tentang kinerja keuangan di instansi pemerintahan yang lain untuk kemudian dapat dibandingkan sehingga menjadi masukan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Melisa. 2012. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin. Makassar. <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/1616>. Akses tgl 5 April 2014. Hal 48-49
- BPK-BMD. 2014. Laporan Realisasi Anggaran tahun 2010-2012. Manado.
- Hariadi Pramono, Tanuar E. Restianto dan Icut R. Bawono, 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.
- Kieso E. Donald., Jerry J. Weygandt, dan Terry, D. Warfield. 2008. *Akuntansi Intermediate Edisi duabelas Jilid 1*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro Mudrajat. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis? Edisi 3*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Kedua*. Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahsun Mohammand, 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Muntu Sandra Jeanet. 2011. Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bitung. *Skripsi* (tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi. Manado. Hal 42-45.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Nordiawan Deddy dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta.
- Sagay Brian. 2013. Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Minahasa Selatan. Universitas Sam Ratulangi, Manado. *Jurnal EMBA* ISSN 2303-1174, Vol 1. Akses tgl 5 April 2014. Hal 1171.
- Sangadji Etta Mamang dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian*. Penerbit Andi, Malang.
- Suhayati, Ely dan Sry Dewi Anggadini. 2009. *Akuntansi Keuangan*. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.